



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 30 Desember 2024

Nomor : 700.1.2.7/ 297 /Insp-IrbanIII/ 2024  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SKPD Wilayah Irban III Triwulan 4 (Empat)

Yth. Kepala SKPD Wilayah Irban III (Daftar terlampir)  
di tempat

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan 4 (Empat) Tahun 2024 pada SKPD Wilayah Irban III, dengan uraian sebagai berikut:

## A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 69);
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 94);
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/867/Insp/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Melakukan Monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) RR Triwulan IV.

## B. Tujuan

Monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) RR SKPD bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian berjalan secara efektif sesuai dengan rencana sehingga risiko yang teridentifikasi tidak terjadi.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup monitoring adalah realisasi kegiatan pengendalian intern Triwulan 4 (Empat) pada SKPD wilayah Irban III, sebanyak 10 SKPD, yaitu :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kecamatan Pelaihari
9. Kecamatan Batu Ampar
10. Kecamatan Bumi Makmur

### **D. Urian Hasil Pemantauan**

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian berjalan secara efektif sesuai dengan rencana sehingga risiko yang teridentifikasi tidak terjadi. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Pengendalian Triwulan 4 (Empat) Tahun 2024 terdapat catatan sebagai berikut :

1. Inspektorat

Dari Rencana Tindak Pengendalian yang disusun, yang telah dilakukan adalah :

- a) pendampingan ke PD dan evaluator agar terdapat persamaan persepsi
- b) membuat aplikasi sederhana pengawasan yang memuat jadwal dan hasil pengawasan
- c) akan berkoordinasi dengan Kominfo dan BPKP pusat terkait integrasi online Siswaskeudes dan Siskeudes Pemda Tala
- d) akan melaksanakan FGD antara Pemerintah Kab.Tala, Dirjen Minerba, BPK terkait penghapusan temuan Pertambangan 150 M
- e) melaksanakan bimbingan penyusunan rencana aksi RB dengan narasumber dari Kemenpan RB RI

Terdapat Rencana Tindak Pengendalian yang belum dilakukan yaitu membuat SOP pengawasan tujuan tertentu, , atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan dan mencari alternatif Rencana Tindak Pengendalian lain untuk Rencana Tindak Pengendalian yang belum dilaksanakan, sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari Rencana Tindak Pengendalian yang disusun, sudah berjalan yaitu :

- a) Peningkatan Kompetensi SDM pelaksana terkait simonev melalui sosialisasi,
- b) Melaksanakan Bimtek SAKIP
- c) Pembuatan Perbup RIPDA (dalam bentuk draf)

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan sudah berjalan dan efektif dalam mencegah terjadinya risiko, atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun telah dilakukan, yaitu :

- a) Melakukan parenting dan sosialisasi pentingnya PAUD
- b) Melakukan pendekatan kepada pondok pesantren murni agar mau menyelenggarakan pendidikan umum
- c) memenuhi semua kebutuhan sekolah terkait akreditasi sekolah
- d) membentuk TIM Tenaga Ahli Cagar Budaya dan melakukan bimtek

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan sudah berjalan dan efektif dalam mencegah terjadinya risiko, atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rencana Tindak Pengendalian sudah berjalan, adalah :

- a) Koordinasi dengan Bulog
- b) Koordinasi dengan penyedia
- c) Koordinasi dengan pedagang pengecer tentang pemberian informasi data yang benar
- d) Koordinasi dengan pedagang pengecer tentang pemberian informasi data yang benar
- e) Berkoordinasi dengan Poktan dan menyampaikan bahwa pembangunan sarana penunjang dapat diberikan bertahap oleh pemerintah dan persyaratan hibah tanah harus lengkap
- f) Berkoordinasi dengan poktan bahwa pengisian gabah lebih diutamakan swadaya dari kelompok terlebih dahulu dan bantuan dari pemerintah hanya bersifat stimulan
- g) Berkoordinasi dengan calon penyedia mesin Bed Dryer/RMU untuk menentukan harga yang sesuai dengan Pagu anggaran yang tersedia dan Memberikan pemahaman pada masyarakat (poktan) bahwa bantuan penyediaan infrastruktur pendukung

lambung pangan (Bed dryer/RMU) lebih diutamakan swadaya dari kelompok terlebih dahulu dan bantuan dari pemerintah hanya bersifat stimulan

- h) Berkoordinasi dengan anggota kelompok yang mengikuti kajitiru
- i) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik
- j) Peningkatann ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal, untuk peningkatan pemenuhan pangan yang dibutuhkan tubuh.
- k) Terlaksananya promosi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan dengan gerakan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, pameran dan sarana percontohan rumah pangan B2SA di Desa, Lomba Cipta Menu B2SA
- l) Koordinasi dengan lintas instansi terkait agar kegiatan sosialisasi keamanan pangan lebih ditingkatkan
- m) Melakukan bimtek laminasi kapal penangkapan ikan

Belum dilaksanakan/tidak disertai bukti dukung :

- a) Penambahan rapid test kit (alat uji sampel) atas risiko Kurangnya jaminan pangan yang aman dan bebas dari zat berbahaya
- b) Melaksanakan bimbingan teknis/ pelatihan untuk petugas teknis berdampak pada hasil uji sampel yang kurang akurat
- c) Fasilitasi Pengukuran Kapal Nelayan
- d) Melaksanakan Patroli bersama Satpolairud Tanah Laut
- e) Melaksanakan pendataan sumber daya ikan
- f) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan

Terdapat Rencana Tindak Pengendalian yang belum dilakukan, atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan dan mencari alternatif Rencana Tindak Pengendalian lain untuk Rencana Tindak Pengendalian yang belum dilaksanakan, sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

#### 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun telah dilakukan, yaitu :

- a) Mengikut sertakan ASN sesuai dengan kebutuhan SKPD (Diklat PPNS Diklat Damkar 1)
- b) Membuat SOP terkait pelayanan warga yang memperoleh kerugian materiil (keruswakan akibat penegakan Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) masih minim

c) Mengevaluasi kembali SOP yang sudah disusun

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan sudah berjalan dan efektif dalam mencegah terjadinya risiko, atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun telah dilakukan, yaitu :

- a. Melakukan pembinaan ke Koperasi dan Bimbingan teknis
- b. Pedagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar dan juru pungut retribusi pelayanan pasar berhalangan datang ke pasar.
- c. Jemput bola timbangan pedagang yang akan dilakukan tera - tera ulang
- d. Melaksanakan Sosialisasi Kemetrologian langsung kepada pedagang sebelum pelaksanaan sidang tera tera ulang
- e. Meningkatkan kesadaran Pedagang dalam menaati peraturan perda dan Meningkatkan pengawasan dan penertiban oleh petugas wastib pasar.
- f. Meningkatkan kesadaran Pedagang dalam membayar retribusi pasar dan meningkatkan kesadaran Pemungut dalam memungut retribusi pasar

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan sudah berjalan dan efektif dalam mencegah terjadinya risiko, atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Tindak Pengendalian sudah berjalan, yaitu :

- a) Akan mengumpulkan pelaku usaha yang lokasinya searah di suatu tempat guna efisiensi
- b) Akan menambahkan jumlah unit alat transportasi
- c) Akan melaksanakan Bimtek dan sosialisasi LKPM
- d) Akan meningkatkan pemahaman pengguna layanan saat pengisian survey melalui website dan petugas
- e) Koordinasi dengan SKPD Teknis dalam penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Tanah Laut.
- f) melaksanakan studi banding kepada daerah lain dan meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan kajian/penelitian

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan sudah berjalan dan efektif dalam mencegah terjadinya risiko, atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang telah berjalan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

#### 8. Kecamatan Pelaihari

Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan, yaitu :

- a) Melakukan koordinasi intensif dengan pihak yang berkepentingan atas risiko Pemahaman kelompok organisasi atas penyusunan laporan realisasi hibah atas risiko Penyelenggaraan Pelatihan Penentuan Batas Desa Belum Optimal
- b) mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait
- c) Perlunya koordinasi di awal perencanaan atas risiko Tidak maksimalnya realisasi anggaran karena Musrenbang dilaksanakan perdapil

Pada triwulan 3 (tiga) Rencana Tindak Pengendalian yang ada belum bisa menghilangkan risiko atas :

- a) dana hibah yang tidak terelisasi 100 %, karena harga tiket pesawat (Akomodasi) Pengisi acara kegiatan hibah lebih rendah daripada RAB, sisa belanja telah dikembalikan.
- b) Penyelenggaraan Pelatihan Penentuan batas desa belum optimal
- c) Tidak maksimalnya realisasi anggaran karena Musrenbang dilaksanakan perdapil

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi risiko, berdasarkan hal tersebut, agar melakukan evaluasi atas seluruh Rencana Tindak Pengendalian untuk mencari Rencana Tindak Pengendalian yang lebih efektif dalam mengatasi risiko yang masih terjadi, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana aksi di tahun berikutnya.

#### 9. Kecamatan Batu Ampar

Rencana Tindak pengendalian yang sudah berjalan, yaitu :

- a) berkoordinasi dengan Pihak penerima Hibah dan pihak- pihak terkait atas risiko ada dan hibah yang tidak terealisasi
- b) Menyediakan Narasumber dari Bidang Kesra dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari atas risiko kurangnya Pemahaman kelompok organisasi atas penyusunan laporan realisasi hibah
- c) Melibatkan LPTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten atas risiko Tidak maksimalnya hasil yang ingin dicapai
- d) Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan
- e) Persiapan untuk konsumsi kadang tidak terpenuhi
- f) Penyelenggaraan Upacara Hari Kemerdekaan RI belum optimal
- g) Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi Tata Pemerintahan Desa belum Optimal
- h) Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan
- i) Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan
- j) Membengkaknya anggaran makan minum peserta

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi risiko, berdasarkan hal tersebut, agar melakukan evaluasi atas seluruh Rencana Tindak Pengendalian untuk mencari Rencana Tindak Pengendalian yang lebih efektif dalam mengatasi risiko yang masih terjadi, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana aksi di tahun berikutnya.

Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan sudah berjalan dan efektif dalam mencegah terjadinya risiko, atas hal tersebut agar melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang telah berjalan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi untuk tahun berikutnya.

#### **E. REKOMENDASI**

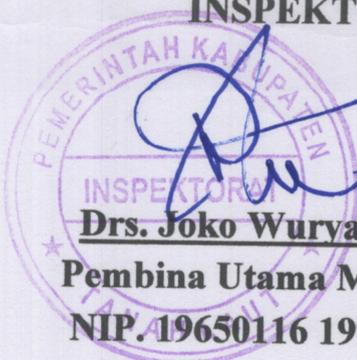
Sehubungan dengan hasil monitoring di atas, disarankan kepada Kepala SKPD Wilayah Irban III untuk :

1. Melakukan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang telah berjalan di tahun 2024, dan memperbaharui Rencana Tindak pengendalian untuk Rencana Tindak pengendalian yang belum berjalan di tahun 2024.
2. Melakukan identifikasi risiko dan Rencana tindak pengendalian untuk tahun 2025.
3. Sesuai draf Draft Pedoman MCP Tahun 2025-2026, pada sektor pelayanan publik, agar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat daftar risiko (*Risk Register*) korupsi dalam proses penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan, dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat daftar risiko (*Risk Register*) korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2025.

#### **F. PENUTUP**

Demikian Laporan Monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risk Register SKPD Wilayah Irban III Triwulan 4 (Empat) disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.

**INSPEKTUR,**



**Drs. Joko Wuryanto, M. Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19650116 199203 1 008**